

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
UNCONDITIONAL GRANTS, INVESTASI TERHADAP
BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2012-2018)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Ela Firdayanti
165020101111023**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UNCONDITIONAL GRANTS, INVESTASI
TERHADAP BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2012-2018)**

Ela Firdayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pdbangunan
Universitas Brawijaya[#]

Email: ella.firdayanti1998@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, unconditional grants, investasi terhadap Belanja Daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sementara itu PAD < Unconditional Grants merupakan wujud dari desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan analisis multivariat, dimana model pertama menggunakan regresi linear berganda dan pada model kedua menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa variabel PAD, DAU, Investasi PMA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Pada variabel DBH memiliki arah yang positif namun tidak signifikan terhadap belanja daerah dan investasi PMDN memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Selanjutnya, variabel Belanja Daerah sebagai hasil hitung dari persamaan pertama memiliki hasil pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2012-2018.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal Investasi PMA, Investasi PMDN, Belanja Daerah.

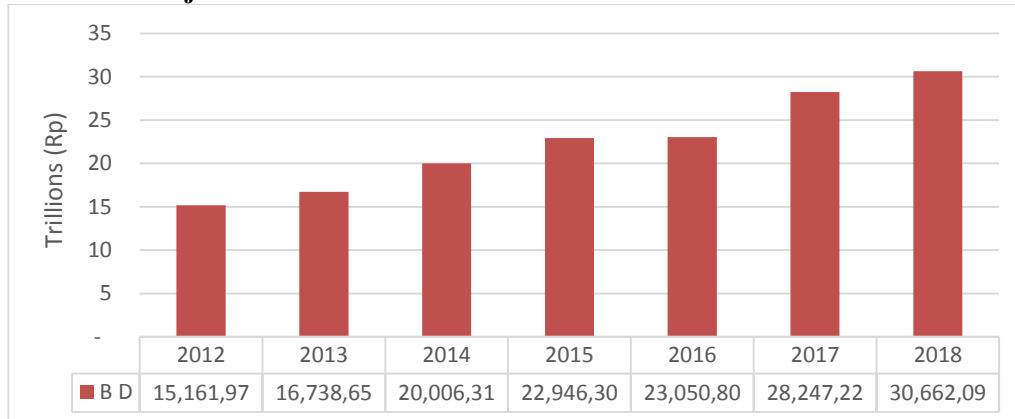
A. PENDAHULUAN

Sejak mulai digulirkannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001 sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 serta Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Suatu daerah dalam upaya untuk membangun daerahnya dilakukan berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah juga mampu menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi pada pemerintah pusat, sehingga dengan adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif yang berada di daerah.

Menurut Kawedar (2008) Belanja Daerah merupakan perkiraan dari beban pengeluaran suatu daerah yang dialokasikan secara adil dan merata supaya relatif dan dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi, terkhusus dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah yang didalamnya terdiri atas seluruh komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung (Permendagri No. 25 Tahun 2009), merupakan pengalokasian dana nya dilakukan secara efektif serta efisien, terlebih belanja daerah dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dalam otonomi daerah

Pemerintah mengalami berbagai permasalahan daerah dalam organisasi sektor publik yaitu mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan besaran alokasi dana yang digunakan untuk menjalankan masing-masing program kegiatan. Pengalokasian dana yang dilakukan oleh pemerintah dianggarkan dalam bentuk anggaran belanja daerah pada post Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap. Untuk meningkatkan belanja daerah, jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) harus besar.

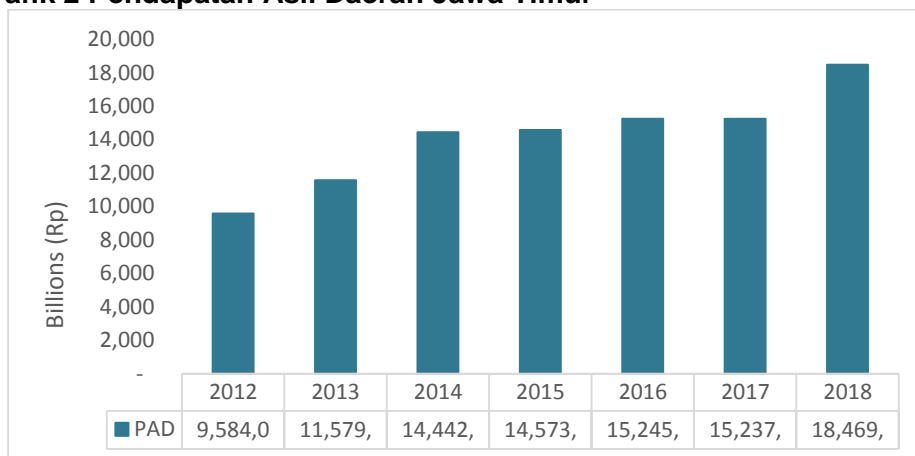
Grafik 1: Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah.

Dilihat pada Grafik diatas, selalu mengalami peningkatan pada proporsi keuangannya. Selama kurun waktu 7 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2018, mengalami peningkatan penyaluran proporsi belanja daerah di Provinsi Jawa Timur hingga berada pada angka tertinggi pada tahun 2018 dengan nominal belanja daerah sebesar 30,66 Triliun. Dengan fakta dalam urusan pengalokasian belanja, pemerintah daerah lebih cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional pemerintahan. Dalam memenuhi kegiatan operasional didukung dari sumber penerimaan daerah itu sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Berikut merupakan perkembangan pendapatan asli daerah di Jawa Timur dalam kurun waktu 7 tahun terakhir:

Grafik 2 Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur

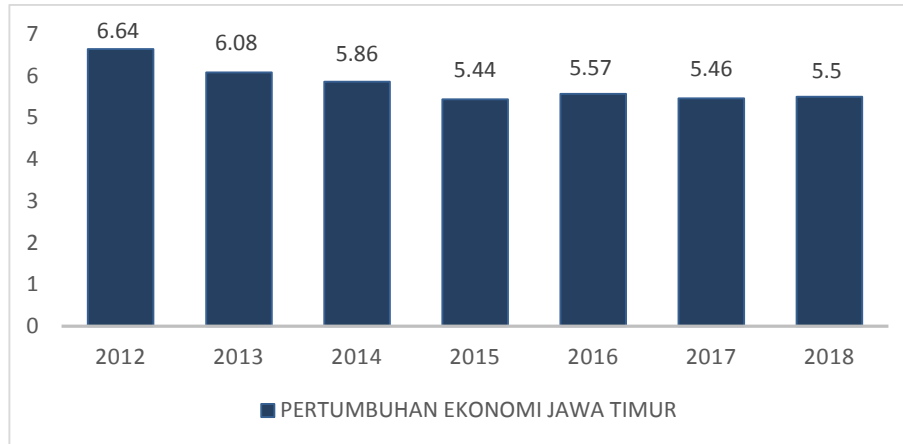


Sumber: DJPK, data diolah.

Berdasarkan data pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 7 tahun terakhir, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi komponen pada peningkatan penerimaan pajak daerah pada setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, karena besarnya realisasi pendapatan asli daerah menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik. Dimana kegiatan pembangunan yang semakin meningkat menunjukkan kemandirian daerah tersebut serta

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Parameter pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat melalui laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2012 sampai 2018 yang dijelaskan pada grafik dibawah ini:

Grafik 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2012-2018



Sumber: BPS, data diolah.

Dapat dilihat kembali bahwa tren pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Menurut Maknun dan Yasin (2001) salah satu kunci pertumbuhan ekonomi ialah Investasi, karena dengan investasi dapat memicu terjadinya kenaikan output, sehingga akan meningkatkan permintaan input, dan terjadi peningkatan kesempatan kerja. Dengan melihat nilai investasi yang ada di Indonesia berdasarkan nilai realisasinya, dibawah merupakan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Tabel 1 Realisasi PMA dan PMDN Jawa Timur

Tahun	PMA (Juta US\$)					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten	Jawa Tengah	D.I.Y	Jawa Timur
2014	3 053.0	1 671.0	709.0	224.0	48.0	497.0
2015	4 463.0	4 497.0	1 737.0	608.0	130.0	742.0
2016	6 751.0	5 369.0	2 161.0	1 054.0	252.0	1 473.0
2017	8 803.0	5 309.0	2 479.0	95.0	179.0	1 750.0
2018	6 499.0	4 713.0	1 895.0	801.0	184.0	1 441.0
Tahun	PMDN (Milyar Rupiah)					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten	Jawa Tengah	D.I.Y	Jawa Timur
2014	17 811.5	18 726.9	8 081.3	13 601.6	703.9	38 132.0
2015	15 512.7	26 272.9	10 709.9	15 410.7	362.4	35 489.8
2016	12 216.9	30 360.2	12 426.3	24 070.4	948.6	46 331.6
2017	47 262.3	38 390.6	15 141.9	19 866.0	294.6	45 044.5
2018	49 097.0	42 278.2	18 637.6	27 474.9	6 131.7	33 333.1

Sumber: BPS, data diolah.

Dengan adanya investasi yang dapat menunjang perekonomian, terdapat permasalahan yakni iklim investasi yang tidak stabil di provinsi Jawa Timur dikarenakan investor asing menahan diri untuk menanamkan modalnya di negara berkembang karena adanya pemilu di tahun mendatang yang membuat para investor memilih mengalihkan dananya ke *safe haven* seperti dollar. Serta alur regulasi investasi dari pusat mengalami beberapa kendala dan terdapat perubahan teknis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Unconditional Grants*, dan Investasi terhadap Belanja Daerah pada studi kasus 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2018?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi

The Decentralization Theorem oleh Oates (1993) menyatakan bahwa penyediaan barang publik pada suatu wilayah akan lebih efisien jika pemerintah daerah yang menyediakan daripada pemerintah pusat yang menyediakan barang publik tersebut untuk daerah. Pandangan tersebut dilandasi oleh dua alasan, yaitu adanya asimetri informasi dan politik nasional kepada daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat pada masing-masing wilayah administratif daerah daripada pemerintah pusat, sehingga pengetahuan atas preferensi lokal dimiliki oleh pemerintah daerah daripada pemerintah pusat. Hal tersebut disebut dengan *Knowledge in society*. Selain itu, pemerintah pusat yang terkendala dalam rasa keadilan nasional, yang mana perlakuan pemerintah pusat akan setara kepada setiap daerah padahal variasi kebutuhan daerah berbeda-beda.

Dalam teorema yang dikemukakan tersebut memiliki penekanan akan pentingnya *revenue* dan *expenditure assignment* pada tingkat level pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan. Melalui pandangan tersebut, bahwa pemerintah di daerah akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan masyarakat maka keputusan atas implementasi desentralisasi fiskal akan sangat nyata. Oleh karena itu bagian dari sistem desentralisasi fiskal adalah kewenangan perpajakan (*local taxing power*), keleluasaan untuk belanja daerah (*expenditure assignment*), perencanaan hingga penentuan dan pelaksanaan anggaran (*budget discretion*), serta kebebasan investasi dengan meminjam, kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain (Khusaini, 2018).

Desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam peraturan tersebut pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepala daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung-jawab daerah yang dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follow function* (Khusaini, 2016).

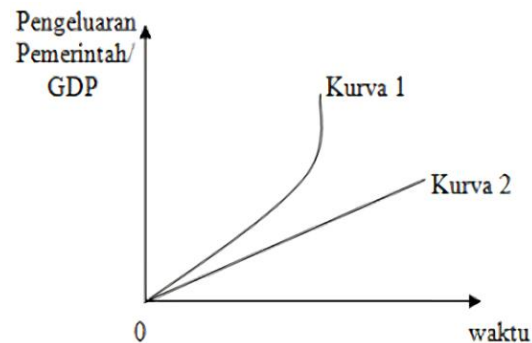
Belanja Pemerintah Daerah

Menurut Rostow dan Musgrave dalam Haryanto (2013) bahwa terdapat tiga tahap yang menghubungkan antara pengeluaran pemerintah dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal suatu perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi lebih besar. Hal tersebut disebabkan, pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana yang menunjang perekonomian seperti pendidikan, kesehatan prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi supaya stabil, namun pada tahap ini peran investasi swasta semakin besar. Pada tahap menengah ini, dikarenakan banyaknya investasi swasta yang masuk, maka peran pemerintah lebih besar dikarenakan

akan terjadi kegagalan pasar dan membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dari yang lebih besar dari segi kuantitas dan kualitas.

Wagner, ada 5 (lima) hal yang menjadi penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi serta ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

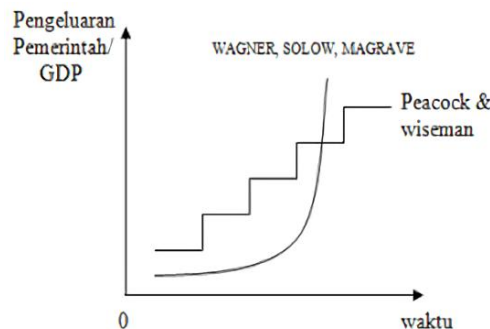
Gambar 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner



Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangan terhadap suatu teori yang disebut *Organis theory of state* yaitu teori organis yang menganggap bahwa pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah, yang mendasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari sisi pajak.

Gambar 2 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah menurut Peacock dan Wiseman



Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

Investasi

Menurut Todaro (2003) persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertama, Akumulasi Modal. Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN, menurut Undang-undang No.6 tahun 1968 merupakan penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Definisi PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun secara tidak langsung/*portfolio* (Suyatno, 2003).

Investasi asing yang berada di Indonesia menurut Undang-undang No. 11 tahun 1970 merupakan penanaman modal asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan proyek di Indonesia, dalam hal ini pemilik modal secara langsung menanggung resiko atas penanaman modal tersebut. Menurut Krugman (1991) arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain adalah definisi dari PMA. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, namun bisa terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan yang berada di luar negeri.

Teori Alan M. Rugman menjelaskan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Terdapat tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian diantaranya variabel ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi biasanya berupa tenaga kerja dan modal, teknologi dan tersedianya sumber daya alam serta keterampilan manajemen. Menyusun sistem fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam masyarakat. Variabel non-ekonomi meliputi politik, sosial dan budaya masyarakat setiap negara mempunyai ciri khas masing-masing. Faktor ketiga adalah variabel pemerintah yang harus diperhatikan oleh perusahaan penanaman modal asing dimana modal asing akan masuk.

Pertumbuhan Ekonomi

Harrod-Domar menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk domestik bruto bergantung langsung kepada tingkat tabungan nasional neto yang berbanding terbalik dengan rasio modal *output* nasional. Rasio modal *output* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk dalam periode waktu tertentu. Sedangkan rasio tabungan neto merupakan tabungan yang dinyatakan dalam bagian pendapatan yang disisihkan dalam periode waktu tertentu. Sehingga tingkat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod-Domar dinyatakan dengan persamaan berikut ini:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s^G}{c} - \delta$$

Dimana:

$\frac{\Delta Y}{Y}$ = Pertumbuhan *Gross Domestic Product*

c = Konsumsi

s^G = Tabungan bruto

δ = Tingkat penyusutan modal

Logika dari persamaan diatas adalah untuk tetap tumbuh, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan bagian tertentu dari *Gross Domestic Product*. Semakin banyak *Gross Domestic Product* yang ditabung dan diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi juga semakin cepat. Akan tetapi, laju pertumbuhan aktualnya untuk setiap tingkat tabungan dan investasi dikurangi dengan seberapa banyak tambahan *output* yang dapat diperoleh dari penambahan jumlah investasi dapat diukur dengan kebalikan rasio modal output. Ini berarti bahwa dengan melipat gandakan tingkat investasi baru dengan tingkat produktivitasnya, maka akan diperoleh tingkat pertumbuhan yang akan mempengaruhi pendapatan nasional.

Model makroekonomi Keynesian merupakan teori yang menjelaskan bahwa perekonomian berfluktuatif dalam jangka pendek dengan fokusnya pada sisi pengeluaran secara agregat. Identitas dasar Keynesian dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$PDB = C + I + G$$

Dimana: C merupakan total konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa; I merupakan investasi; dan G merupakan pengeluaran pemerintah.

Menuurut teori yang dibawakan oleh Keynes, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan mempengaruhi perekonomian negaranya. Dalam teori ini, pemerintah merupakan agen independen yang merangsang perekonomian melalui kinerja publik dan percetakan. Apabila pemerintah memiliki kebijakan ekspansi maka “permintaan efektif” akan meningkat jika sumber daya digunakan tanpa mengganggu konsumsi dan investasi. Kebijakan pemerintah dalam pajak dan belanja daerah dapat dilakukan kepada daerah untuk membuat pertumbuhan ekonomi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dengan metode analisis data panel multivariat. Pada nalaisis multivariat melibatkan variabel bebas lebih dari satu dibutuhkan beberapa asumsi-asumsi yang harus diteliti, yakni pada model pertama memerlukan uji asumsi klasik. Dimana penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan data nominal dan statisika untuk menjawab tujuan penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan penentuan tempat yang dilakukan *purposive* dengan rincian 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis multivariat memungkinkan dalam satu analisis terdapat beberapa hipotesis dan beberapa analisis data atau pengujian. Dalam penelitian ini, analisis multivariat dilakukan sebanyak 2 kali sehingga terbentuk dua model. Pada model pertama menggunakan regresi berganda dan model kedua menggunakan regresi sederhana sebagai uji lanjutan dari model yang pertama. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua model persamaan, yaitu (1) persamaan belanja daerah dan (2) persamaan pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

(i) Persamaan Belanja Daerah

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PMA_{it} + \beta_5 PMDN_{it} + \varepsilon_{it}$$

(ii) Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi}_{it} = \beta_0 + \beta_1 BD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

BD_{it} = Belanja Daerah

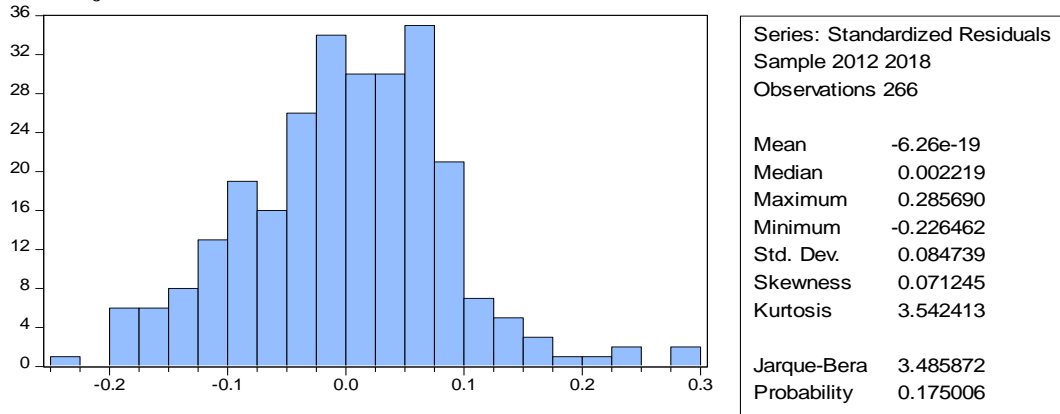
ε = Error term

i = *Cross Section* (Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

t = *Time Series* (Tahun 2012-2018)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas



Sumber: hasil output eviws 10.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar diatas, nilai probability jarque-bera sebesar 0.175006 dimana pada nilai tersebut melebihi nilai α dalam penelitian ini sebesar 0.05 atau 5%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa residual pada penelitian ini bersistribusi normal, sebab probability lebih besar dari nilai alpha

Uji Chow

Tabel Hasil Pengujian Likelihood Ratio Test

Model	Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
BD	Cross-section F	7.117437	(37,223)	0.0000
	Cross-section Chi-square	207.412665	37	0.0000
Growth	Cross-section F	210.358616	(37,227)	0.0000
	Cross-section Chi-square	947.898868	37	0.0000

Sumber: Output eviws 10.

Berdasarkan hasil pengujian *Likelihood Ratio Test* pada tabel 4.2, model 1 Belanja Daerah dan model 2 Growth dengan probabilitas $0.000 < (0.05)$. Maka dapat disimpulkan adalah menolak H_0 , sehingga hasil dari pengujian ini menguatkan dugaan bahwa model 1 (Belanja Daerah) dan model 2 (Growth) sebaiknya menggunakan model *Fixed Effect*.

Uji Hausman

Tabel Hasil Pengujian Hausman Test

Model	Test Summary	Chi-square Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
BD	Cross-section random	58.731645	5	0.0000
Growth	Cross-section random	0.000000	1	0.0000

Sumber: Output eviws 10.

Hasil uji pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas untuk model 1 (Belanja Daerah) adalah $0.0000 < \alpha (0.05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model 1 lebih baik menggunakan pendekatan model *Fixed Effect*. Begitupula dengan hasil uji hausman model kedua menunjukkan nilai dari probabilitas adalah $0.0000 < \alpha (0.05)$ sehingga untuk model 2 menggunakan pendekatan model *Fixed Effect*.

Hasil Pengujian Model 1

Dependent Variable: Belanja Daerah					Arah	Signifikansi
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.		
C	-16.54990	2.745786	-6.027382	0.0000		
LN_PAD	0.184445	0.037924	4.863579	0.0000	Positif	Signifikan
LN_DBH	0.006957	0.004910	1.416838	0.1579	Positif	Tidak Signifikan
LN_DAU	1.446083	0.130897	11.04750	0.0000	Positif	Signifikan
LN_PMA	0.004514	0.002180	2.070458	0.0396	Positif	Signifikan
LN_PMDN	-0.000523	0.001624	-0.321875	0.7478	Negatif	Tidak Signifikan
R-squared	0.972791	Mean dependent var		28.14613		
Adjusted R-squared	0.967666	S.D. dependent var		0.513718		
S.E. of regression	0.092375	Akaike info criterion		-1.778935		
Sum squared resid	1.902895	Schwarz criterion		-1.199648		
Log likelihood	279.5983	Hannan-Quinn criter.		-1.546212		
F-statistic	189.8258	Durbin-Watson stat		1.606157		
Prob(F-statistic)	0.000000					

Sumber: Output eviws 10.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{BD}_{it} = & -16.54990 + 0.184445 \mathbf{PAD}_{it} + 0.006957 \mathbf{DBH}_{it} + 1.446083 \mathbf{DAU}_{it} \\
 & + 0.004514 \mathbf{PMA}_{it} - 0.000523 \mathbf{PMDN}_{it}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_1) terhadap variabel belanja daerah (Y) Nilai probabilitas $\alpha=0,05$ maka variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Y). Artinya, dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah, sejalan dengan meningkatnya jumlah Belanja Daerah yang ada di Jawa Timur.

Adapun untuk pengaruh variabel dana bagi hasil (X_2) terhadap belanja daerah (Y), berdasarkan probabilitas dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa probabilitas lebih besar dari nilai alpha 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja daerah, atau dapat dikatakan bahwa belanja daerah tidak dapat dijelaskan secara langsung melalui DBH.

Provinsi Jawa Timur, porsi dana bagi hasil terbesar berasal dari DBH-CHT, selain sumber daya alam yang peruntukannya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan, karena hal ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan menyejahterakan masyarakatnya. Tidak signifikannya tersebut dikarenakan peruntukan DBH didasarkan oleh pembagian hasil pajak dan sumber daya alamnya.

Variabel Dana Alokasi Umum (X_3) memiliki nilai probabilitas yang menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y). Nilai koefisien memiliki angka positif menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel DAU bersifat positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Variabel penanaman modal asing (X_4) nilai probabilitas menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai alpha 0.05 yang menunjukkan bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y). Nilai koefisien memiliki angka positif menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel PMA bersifat positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Penanaman modal dalam negeri (X_5) nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai alpha 0.05 dan nilai koefisien menunjukkan hasil negatif. Maka, hasil penelitian menunjukkan variabel penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap belanja daerah (Y). tidak signifikannya dikarenakan PMDN yang ada di Jawa Timur paling besar berada dibidang perumahan, Kawasan Industri yang mana bidang tersebut merupakan bidang yang berfokus pada kepemilikan badan atau pribadi sehingga tidak menampik bahwa kontribusi PMDN di Jawa Timur memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah, yang notabene belanja daerah digunakan untuk memenuhi belanja langsung dan belanja tidak langsung terkait program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya PMDN belum tentu memberikan pengaruh terhadap kenaikan ataupun penurunan terhadap pengalokasian belanja daerah.

Terjadinya hubungan bersifat negatif dan tidak signifikan ini karena adanya ekspektasi positif dari sektor swasta terhadap pengeluaran pemerintah. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah diharapkan pemenuhan barang-barang publik lebih terjamin. Akan tetapi dalam kenyataannya, permasalahan infrastruktur yang buruk menjadi faktor penghambat investasi di Indonesia (Tambunan, 2006).

Selanjutnya pada hasil statistik dari model kedua dengan variabel Growth, sebagai berikut:

Hasil Pengujian Model II

Dependent Variable: GROWTH					Arah	Signifikansi	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.			
LN_BD2	0.383301	0.129091	2.969236	0.0033	Positif	Signifikan	
C	23.74676	0.010918	2174.917	0.0000			
R-squared	0.971693	Mean dependent var		23.74676			
Adjusted R-squared	0.966954	S.D. dependent var		0.979585			
S.E. of regression	0.178075	Akaike info criterion		-0.478539			
Sum squared resid	7.198314	Schwarz criterion		0.046860			
Log likelihood	102.6457	Hannan-Quinn criter.		-0.267466			
F-statistic	205.0549	Durbin-Watson stat		1.040377			
Prob(F-statistic)	0.000000						

Sumber: Output views 10.

$$GROWTH_{it} = 23.74676 + 0.383301BD_{it}$$

Belanja Daerah (\hat{Y}) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z) menunjukkan nilai t-statistic sebesar 2.969236 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0033 dan koefisien sebesar 0.383301. Berdasarkan nilai probabilitasnya dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0033 dan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka variabel Belanja Daerah (\hat{Y}) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel growth (Z). Nilai koefisien memiliki angka positif menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel belanja daerah (\hat{Y}) bersifat positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap growth.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk melihat pengaruh dana pendapatan asli daerah unconditional grants, investasi PMA dan PMDN terhadap Belanja Daerah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi memiliki hasil bahwa PAD, DAU, Investasi PMA dapat mempengaruhi pengalokasian belanja daerah di kabupaten dan kota Jawa Timur. Sementara, DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran belanja daerah dan Investasi PMDN tidak dapat mempengaruhi belanja daerah yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari belanja daerah estimasi pada model kedua menunjukkan hasil yakni dapat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur selama tahun 2012 hingga 2018.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka adapun beberapa saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini. Pertama, Pemerintah Daerah harus terus menggali potensi dan mengelola Pendapatan Asli Daerah agar dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, penerimaan yang meningkat akan membantu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Kedua, Melihat hasil dari Dana Bagi Hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang disebabkan karena kurang efisiennya alokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kecilnya kontribusi dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta peruntukan DBH yang didasarkan oleh pembagian dana bagi hasil yang berasal dari perhitungan hasil pajak maupun hasil Sumber Daya Alam. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan disebabkan karena rendahnya PAD. Belanja Daerah diharapkan lebih diarahkan pada belanja sektor publik agar pendapatan daerah dari penggunaan sektor publik tersebut dapat menambah kas PAD sehingga ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012 hingga 2018 dapat diminimalisir.

Ketiga, Melihat Penanaman Modal Dalam Negeri tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Karena investasi PMDN masih terpusat di wilayah sentra perekonomian dan industri saja, serta perlunya meningkatkan dan meratakan investasi pada kabupaten dan kota dengan penyederhanaan regulasi untuk kemudahan berinvestasi di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, & Yasa. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Pengangguran melalui Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-jurnal EP Unud. Vol. 4 No. 11*.
- Agustini, Y., & Kurniasih, E. P. 2017. Pengaruh Investasi PMDN, PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 6 No 2 page 97-119.
- Ahmed, Habib dan Stephen M. Miller. 2000. *Crowding-Out and Crowding-In Effects of the Components of Government Expenditure*. <https://www.econ.uconn.edu/working/1999-02.pdf>. Diakses tanggal 23 Maret 2020
- Allen, H. J. B. 1990. *Cultivating the Grass Roots: Why Local Government Matters*. Bombay: International Union of Local Authorities.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPPE
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE UEM.
- Chaparro, J. C., Smart, M. & Zapata, J. G. 2004. *Intergovernmental Transfer and Municipal Finance in Columbia*. ITP Paper 0403. University of Toronto.
- Devita, A. Delis, A. & Junaidi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 2, Desember 2012*
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. 2017. *Laporan Kinerja Penanaman Modal*. (<http://www2.bkpm.go.id>) diakses pada Oktober 2020.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2020. *Realisasi APBD Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) diakses pada Desember 2019
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fiki Ariyanti. 2017. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3036263/jawa-timur-masih-jadi-favorit-investasi-di-ri>, 26 Juli 2017.
- Gujarati, D. N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika* Buku 2 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

- Hajamimi, M., & Falahi, M. A. 2018. Economic Growth and Government Size in Developed European Countries: A Panel Threshold Approach. *Economic Analysis and Policy*, Volume 58 page 1-13.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, Irham. 2012. Flypaper effect pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.13 No.1: 113-131.
- Jha, R. Woojin, K. & Nagarajan, H. K. 2011. *Fiscal Decentralization and Local Tax Effort*. ASARC Working Paper 2011/01.
- Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang UNDIP.
- Khusaini, 2016. The role of public sector expenditure on local economic development. *International Journal of economic Policy in emerging Economics*, 9(2), 182-193.
- Khusaini, 2018. *Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Jawa Timur: Ub Press.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. 2001. Non-linear and asymetrics adjustment in the local revenue-expenditure models: some evidence from the Italian municipalities.
- Machfud, S. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Seminar Nasional “Public Sector Scorecard”, Jakarta
- Machmud, A. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Musgrave, Richard A. & Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw-Hill, 5th edition. Singapore
- Oates, W. E. 1993. Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, Vol.46 No. 2:237-243.
- Oktavia, H. F. Hannani, N. & Suhartini. 2016. Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Pendekatan Input-Output). *Jurnal Habitat*, Vol.27 No. 2: 72-84.
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*. Surabaya: Zifatama Publishing
- Rustiono, D. 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*.
- Rosalia, D. Militina, T. & Lestari, D. 2020. *Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Investasi serta pengeluaran perkapita terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Berau*. JIEM
- Samuelson, Paul A. 1997. *Ekonomi, Jilid I*. Jakarta: Erlangga
- _____. *Ekonomi, Jilid II*. Jakarta: Erlangga
- Sasana, H. 2010. Flypaper Effect pada DAU, DBH, dan PAD Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Sugiyono. 2005. *Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi pembangunan Proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sukirno, S. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. raja Grofindo Perkasa.
- Wagner, A.1911. *Three Extracts on Public Finance* translated and reprinted in R.A masgrave and A.T Peacock (eds), *Classics In The Theory Of Public Finance*. 1958. London: Macmilan
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- _____. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.